

**LAPORAN KINERJA**  
**BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**JAKARTA**

**2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, penyusunan laporan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi, Pusdikmas, Badan Standardisasi Nasional Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Melalui laporan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2016 ini, dapat dilaporkan pencapaian sasaran dan program/kegiatan Bidang Pemasarakatan Standardisasi yang mendukung pencapaian Penetapan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi tahun 2016. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, Rencana Strategis Kedeputan IPS Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja serta pemicu peningkatan kinerja di Bidang Pemasarakatan Standardisasi. Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Bidang Pemasarakatan Standardisasi

**Nur Hidayati**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	1
1.3 Struktur organisasi Bidang Pemasarakatan Standardisasi.....	2
1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan dan Personel Bidang Pemasarakatan Standardisasi .....	2
1.5 Anggaran .....	3
1.6 Sistematika Penyajian .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>4</b>
A. Rencana Bidang Pemasarakatan Standardisasi.....	4
B. Penetapan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi ...	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Pencapaian Kinerja .....	9
B. Akuntabilitas Keuangan .....	24
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>25</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Laporan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi, Pusdikmas, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian yang tercantum di Rencana Strategis Pusdikmas dan Rencana Strategis Kedeputan Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi (IPS) BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis BSN Tahun Anggaran 2015-2019.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2016, Bidang Pemasarakatan Standardisasi mempunyai 4 (enam) indikator kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi (IPS) dan mendukung kinerja BSN. Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran terciptanya budaya standar di masyarakat, maka pada tahun 2016 telah ditetapkan unsur indikator kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi sebagai berikut : 1) Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK , 2) Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan, 3) Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI dan 4) Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian. Indikator kinerja 1 dan 2 untuk mendukung kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi sedangkan indikator 1,3 dan 4 untuk mendukung kinerja kedeputan IPS.

Capaian indikator kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi pada tahun 2016 adalah : (1) Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK meningkat sebesar 25% (2) Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan meningkat sebesar 10% 3) Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI dengan nilai 4,03 skor dan 4) Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian 3,75 skor. Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.928.723.438,- atau 99,76 % dari total pagu Rp 3.938.033.000,-.

Hasil Capaian kinerja diatas, dapat lebih memotivasi Bidang Pemasarakatan Standardisasi untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi terhadap kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional secara Nasional yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan meningkatkan daya saing industri nasional.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan .....	2
Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2015 – 2019 .....	6
Tabel 3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Bidang Pemasyarakatan Standardisasi untuk mendukung IKU Deputi IPS Tahun 2015 – 2019 .....	6
Tabel 4 Penetapan target kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi untuk mendukung penetapan kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016 .....	7
Tabel 5 Penetapan target kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi untuk mendukung penetapan kinerja Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016 .....	8
Tabel 6 Pencapaian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016 .....	9
Tabel 7 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian .....	17
Tabel 8 Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI dan dalam proses sertifikasi.....	20
Tabel 9 Perbandingan Kinerja anggaran PUSDIKMAS Tahun 2015 dan 2016 per Output Kegiatan .....	24

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Pemasarakatan Standardisasi .....	2
Gambar 2. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Facebook) .....	10
Gambar 3. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Twitter).....	11
Gambar 4. Grafik masyarakat yang berkunjung di blog belajacerdas.co.id .....	12
Gambar 5. Kegiatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan SPK.....	13
Gambar 6. Kegiatan Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM .....	14
Gambar 7. Materi promosi SPK .....	15
Gambar 8. Grafik jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI .....	20
Gambar 9. Grafik Penyebaran lokasi UMKM yang dibina dalam penerapan SNI tahun 2016.....	23





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Maksud dari penyusunan Laporan kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi, BSN adalah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya di bidang Pemasarakatan Standardisasi. Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pada tahun 2017 mendatang dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan di bidang Pemasarakatan Standardisasi.

### **1.2 Tugas dan Fungsi**

#### **a. Tugas**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 137, Bidang pemasarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan pemasarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

#### **b. Fungsi**

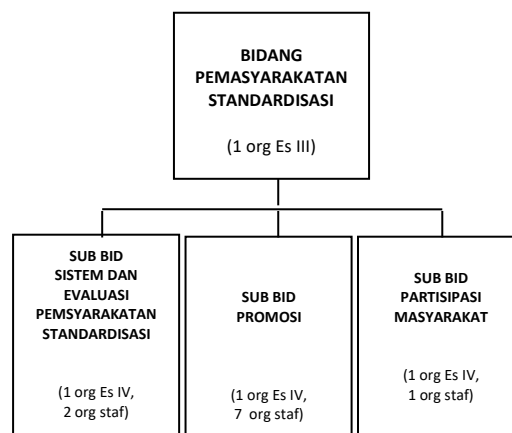
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 137, Bidang Pemasarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, rencana dan program di bidang pemasarakatan standardisasi dan jaminan mutu;
- b. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pemasarakatan standardisasi dan jaminan mutu;

- c. pelaksanaan kegiatan dan pengembangan promosi standardisasi dan jaminan mutu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam promosi standardisasi dan jaminan mutu.

### 1.3 Struktur Organisasi Pusdikmas

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2016 Bidang Pemasarakatan Standardisasi memiliki personil sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 orang Eselon III, 3 orang Eselon IV, 10 orang Staf dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Pemasarakatan Standardisasi

### 1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Pusdikmas

Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan

No	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					Σ Total
		S3	S2	S1	S0	SMA	
1.	Eselon III	-	-	1	-	-	1
3.	Eselon IV		1	2	-		3
4.	Fungsional Widyaiswara	-	-	1	-	-	1

5.	Staf	-	-	9	-	-	9
	<b>Σ Total</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	-	-	<b>14</b>

Jumlah personel aktif di bidang Pemasarakatan Standardisasi pada tahun 2016 mengalami penambahan 2 orang dari tahun 2015, yaitu untuk eselon 4 yang tadinya terdapat satu subbid yang kosong yaitu Subid Promosi dan penambahan satu staf aktif yang tadinya tugas belajar.

### 1.5 Anggaran

Untuk menjalankan kegiatan, maka Bidang Pemasarakatan Standardisasi dialokasikan anggaran APBN 2016 sebesar Rp 3.938.033.000 dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 3.928.723.438 (99,76%).

### 1.6 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi tahun 2016 disusun dengan kerangka sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan.  
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, komposisi dan kualifikasi pendidikan personel sumber daya manusia, serta sistematika laporan.
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja  
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2014.
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja  
Bagian ini menguraikan tentang pencapaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2014.
- d. Bab IV. Penutup  
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **Visi PUSDIKMAS**

**“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ”**

Untuk mencapai visi tersebut , Pusdikmas mempunyai misi yaitu:

##### **Misi**

**Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian.**

Untuk mendukung Visi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai :

##### **Tujuan**

- a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian
- b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
- c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

##### **Sasaran**

Sasaran strategis Pusdikmas adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.

##### **Kebijakan**

1. Penetapan program Pengembangan sistem diklat yang berorientasi pada upaya peningkatan infrastruktur mutu yang mengacu pada standar

2. Penetapan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Penetapan program pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
4. Penetapan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

### **Kegiatan**

Untuk mendukung visi dan misi serta sasaran strategis, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi yang meliputi beberapa sub kegiatan:

- a. Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi baik formal maupun non formal
- b. Pengembangan dan pembinaan pelatihan standardisasi,
- c. Pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), melalui:
  - 1) Promosi SPK kepada regulator
  - 2) Promosi SPK kepada pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
  - 3) Promosi SPK kepada publik/konsumen
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang meliputi:
  - 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
    - a. Peran serta dalam pengembangan SNI
    - b. Peran serta dalam mendapatkan informasi SNI
    - c. Peran serta dalam pemanfaatan SNI
  - 2) Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  - 3) Peningkatan partisipasi konsumen dalam kegiatan standardisasi

Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi mendukung kegiatan Pusdikmas melalui sub kegiatan :

1. Pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Target pencapaian Bidang Pemasyarakatan untuk mendukung sasaran PUSDIKMAS, dengan indikator kinerja, dan target pencapaian sampai tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian Bidang Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2015 – 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	201	2019
Meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%	10%	10%	10%	10%

Bidang Pemasarakatan Standardisasi juga mendukung Indikator Kinerja Utama untuk Deputi bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi, dengan indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Bidang Pemasarakatan Standardisasi untuk mendukung IKU Deputi IPS Tahun 2015 – 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	201	2019
Meningkatnya budaya mutu	Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5
	Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5

## B. Penetapan Kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada khir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan target kinerja 2016 Bidang Pemasarakatan Standardisasi mengacu kepada penetapan kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi 2016. Untuk itu penetapan kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi tertuang dalam tabel 4.

**Tabel 4. Penetapan target kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi untuk mendukung penetapan kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK	10 %
2	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%

**Tabel 5. Penetapan target kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi untuk mendukung penetapan kinerja Deputi bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI	3,2
2	Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	3,8



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Pencapaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemasaryakatan Standardisasi tahun 2016 seperti dalam Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6. Pencapaian Kinerja**  
**Bidang Pemasaryakatan Standardisasi Tahun 2016**

No.	Unsur Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian terhadap target
1.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK	10 %	25%	
2.	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%	10%	100%
3	Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI	3,2	4.03	125
4	Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	3,8	3,75	98,7

**Indikator 1**

**Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,**

Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja untuk prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) mengalami perubahan dengan ditambahkannya masyarakat yang mendapat edukasi SPK.

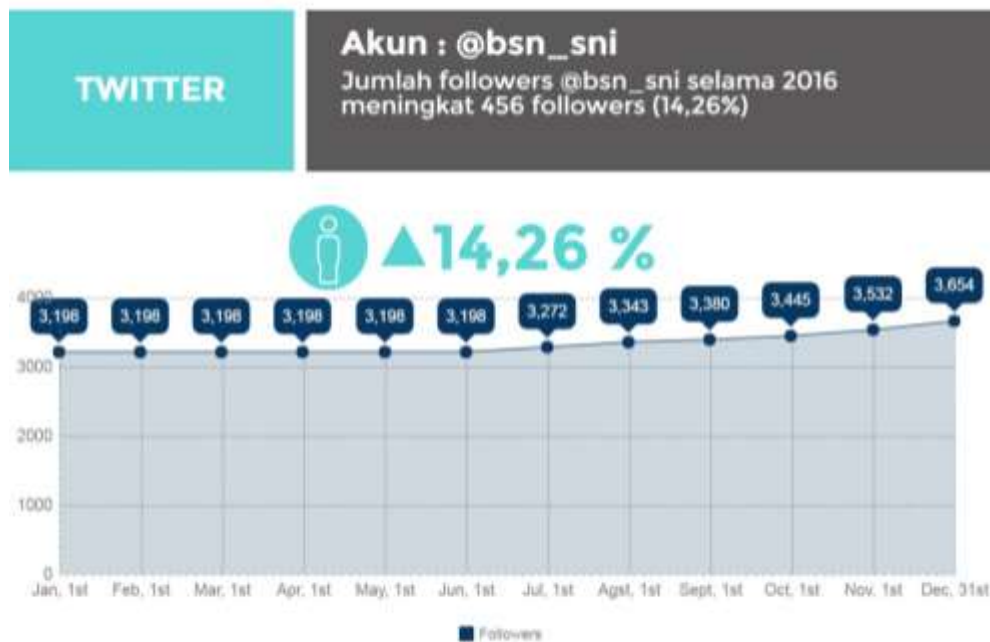
Masyarakat yang mendapat edukasi SPK dihitung dari masyarakat yang mendapat edukasi dan terpapar kegiatan promosi dari media massa, baik radio, TV, media online, media cetak, dari pertemuan/kampanye massal. Pada era keterbukaan dengan canggihnya perkembangan teknologi informasi, strategi promosi suatu lembaga/organisasi cenderung beralih dari media konvensional ke media nonkonvensional seperti media online/media digital dan pemanfaatan media sosial. Pada tahun 2016 edukasi publik banyak dilakukan melalui media digital, sedangkan promosi melalui media konvensional tetap dilakukan seperti di radio dan televisi dengan melalui sistem partnership, mengingat dana yang terbatas. Sedangkan kegiatan Sosialisasi substansi SNI kepada pelaku usaha dan LPK tetap dilakukan melalui forum workshop/FGD/Pertemuan.

Melalui kegiatan tersebut capaian jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK mencapai 2.072.092 dari target 1.800.000 orang (sebagai baseline). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat mencapai 25% dari target 10% yang ditetapkan di tahun 2016 ini. Pencapaian yang melebihi target ini bersumber dari edukasi SNI melalui digital yang bisa menjangkau ratusan ribu orang. Kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih suka membaca artikel dari media online, menjadi alternatif bagi strategi promosi ke depannya. Namun begitu untuk menarik minat masyarakat dalam membaca artikel tentang SNI, diperlukan pengemasan artikel dan judul yang menarik sehingga masyarakat ada ketertarikan untuk membaca. Data pencapaian ini masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia di mana Tahun 2016, usia produktif Indonesia mencapai 178 juta, dengan demikian capaian edukasi SNI baru menysasar 11 persennya. Hal ini berarti masih perlu usaha yang keras dalam menyebarkan informasi dan edukasi SPK kepada masyarakat Indonesia.



Gambar 2. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Facebook)

Berdasarkan gambar 2, pada tahun 2016, jumlah orang yang meng-klik “suka” atau “like” pada akun *Facebook* Badan Standardisasi Nasional mengalami peningkatan sebanyak 1696 orang atau sebesar 46,94%. Pada tanggal 1 Januari 2016 akun *Facebook* BSN mendapatkan 3613 *likes* dan di tanggal 31 Desember 2016 bertambah menjadi 5309 *likes*.



Gambar 3. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Twitter)

Akan tetapi, akun media sosial *Twitter* @bsn\_sni tidak mengalami kenaikan sebesar yang diperoleh akun *Facebook* Badan Standardisasi Nasional. Sepanjang tahun 2016, akun @bsn\_sni hanya mendapatkan penambahan *followers* sebanyak 465 atau sebesar 14,26%. Bahkan di semester pertama 2016, jumlah *followers* sama sekali tidak bertambah atau stagnan (Gambar 3).



Gambar 4. Grafik masyarakat yang berkunjung di blog belanjacerdas.co.id

Untuk meningkatkan publikasi mengenai SNI di media online dan memberikan edukasi kepada konsumen akan pentingnya produk ber SNI, BSN membuat blog tentang bagaimana belanja cerdas. Blog ini baru diluncurkan pada bulan Mei 2016 dan masih dalam taraf pengembangan. Sepanjang tahun 2016 pula, blog belanjacerdas.id yang dikelola oleh BSN un telah dilihat oleh 512 pengunjung (*session*). Dari angka tersebut, 67,6% merupakan pengunjung baru sedangkan 32,4% merupakan “*returning visitors*” atau pengunjung yang pernah melihat blog belanjacerdas.id dan kembali mengaksesnya. Rata-rata pengunjung melihat 1,99 halaman belanjacerdas.id setiap kali mengakses blog tersebut, dengan durasi kunjungan rata-rata selama 1,59 menit (Gambar 4).

Berdasarkan data tersebut, Bidang Pemasarakatan Standardisasi masih perlu meningkatkan partisipasi masyarakat mengakses blog ini. Namun

infrastruktur blog yang masih dalam pengembangan, maka membuat akses terhadap blog masih kurang maksimal. Tahun 2017, akan direncanakan peningkatan *traffic* blog melalui *upgrade hosting*, meningkatkan *backlink* dan *Search Engine Optimizer (SEO)* serta promosi kepada publik blog belanja cerdas ini melalui media sosial. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga dihasilkan melalui kegiatan workshop/sosialisasi/talkshow kepada pelaku usaha dengan bekerjasama dengan KKP, BPOM, komunitas (Gambar5).



**Sosialisasi substansi SNI di Bidang Mikrobiologi**



**Gathering SNI Award**



**Edukasi SNI kepada Publik dalam r Hakteknas**



**Talkshow Role Model Penerap SNI**



**Talkshow UKM Pangan**



**Pertemuan Sinergi dalam pembinaan UMKM dengan KKP dan BPOM**

**Gambar 5. Kegiatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan SPK**



Partisipasi pelaku usaha dalam penerapan SNI didorong khususnya kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM ditingkat nasional (gambar 6).

#### Pembinaan UKM Poklasar Taman Grya



#### Pembinaan UKM Cindy Group



#### Pembinaan UKM Mina Food



#### Pembinaan UKM Bintang Snack Millenium



Gambar 6. Kegiatan Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM

## Indikator 2

## Prosentase peningkatan jumlah materi promosi yang disebarluaskan kepada publik

Capaian indikator kinerja prosentase peningkatan jumlah materi promosi yang disebarluaskan pada tahun 2016 tercapai 10 % dari 10 % yang ditargetkan atau tercapai 24 materi promosi sesuai yang ditargetkan. Pada tahun ini, BSN tidak banyak menghasilkan materi promosi dalam bentuk audio visual dikarenakan pemotongan anggaran. Materi promosi lebih diperbanyak dalam bentuk visual infografis untuk disebarluaskan di media sosial (seperti dalam Gambar 7).



Majalah SNI Valuasi



Video Si Rino



Video Role Model Penerap SNI



Video Mengenai SNI Award



Infografis



e-poster

Gambar 7. Materi promosi SPK

<b>Indikator 3</b>	<b>Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI</b>
<b>Indikator 4</b>	<b>Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian</b>

Untuk mendukung indikator kinerja utama Deputi bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi, bidang Pemasarakatan Standardisasi menyelenggarakan survei Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap daya saing produk ber SNI. Ketika masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap daya saing produk berSNI, artinya masyarakat menilai bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang tinggi dan asumsi, masyarakat percaya produk berSNI mempunyai keunggulan lebih dibanding produk yang tidak memenuhi SNI. Seharusnya produk yang berSNI dapat lebih berdaya saing di pasar baik di pasar lokal, nasional maupun global.

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI, BSN melakukan survei dengan 4000 responden yang dilakukan di 10 kota besar, yaitu Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado dan Bali. Survei disebarakan kepada stakeholder yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI cukup tinggi yaitu dengan skor 4,05 (skala likert, kategori baik). Nilai ini melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 3,2, tercapai (125%). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang cukup baik dan masyarakat juga mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai value yang lebih dibanding produk yang tidak ber SNI.

Untuk mendukung indikator kinerja utama Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK, Bidang Pemasarakatan Standardisasi juga melakukan survei tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK. Kegiatan ini juga dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama deputi bidang informasi dan pemasarakatan standardisasi. Kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, pemasarakatan standardisasi yang dilakukan BSN diharapkan meningkatkan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasarakatan standardisasi dan



penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan menghasilkan persepsi masyarakat terhadap SPK semakin baik.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN melakukan survei yang diselenggarakan secara bersamaan dengan survei persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 4000 responden.

**Tabel 7. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2016**

<b>Pernyataan</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>Prosentase</b>	<b>Indeks Total</b>	<b>Indeks Total dalam skala 5</b>
Pengetahuan Tentang BSN	19,13 (dari 25)	<b>76,52</b>	<b>75,02</b>	<b>3,75</b>
Pengenalan Tentang SNI	21,69(dari 25)	86,76		
Penerapan SNI	19,51(dari 25)	78,04		
Sertifikasi SNI	14,69(dari 25)	58,76		

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap SPK sudah baik. Masyarakat sudah mengetahui institusi BSN yang menetapkan SNI (76,52 %) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 49,2%. Namun sebagian juga ada yang masih memahami bahwa sertifikasi SNI itu dilakukan oleh BSN. Secara umum, masyarakat sudah tahu SNI, apa itu SNI, dan tanda SNI pada produk (86,76%). Masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk dan untuk perlindungan masyarakat (78,04%). Namun terkait dengan sertifikasi SNI, persepsi masyarakat masih rendah (58,76 %). Masyarakat masih melihat bahwa proses sertifikasi itu tidak mudah dan rumit serta mahal. Disamping itu masyarakat juga belum memahami bahwa sertifikasi SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Persepsi ini hampir sama untuk semua unsur stakeholder.

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat persepsi masyarakat menghasilkan indeks persepsi sebesar 75,02 (skala 100) atau 3.75 (skala 5). Nilai ini tidak mencapai target yang

diharapkan sebesar 3,8, atau hanya tercapai 98,7 %. Hal ini dikarenakan nilai yang terkait dengan persepsi tentang Sertifikasi SNI masih rendah, meskipun sudah naik dari tahun sebelumnya yang hanya 50,4 %. Untuk itu, perlu edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya kepada pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi SNI dan juga BSN kerjasama dengan stakeholder perlu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur mutu (LPK), sehingga LPK mudah didatangi oleh pelaku usaha di wilayah tersebut yang membuat biaya sertifikasi bisa diminimalisir

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi, dalam survei tersebut, BSN juga menanyakan strategi promosi yang diharapkan oleh masyarakat masih didominasi melalui media mainstream seperti TV, Radio, media cetak dll. Responden yang memilih media online sebagai sumber informasi mengenai SNI hanya 6,3%, cenderung turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16,6%. Hal ini bisa saja disebabkan karena mayoritas usia responden berada pada rentang 35 – 55 tahun. Pada usia responden ini, lebih menyukai media *mainstream* dan belum banyak yang menyukai media online. Selain itu, masyarakat di daerah masih menyukai informasi yang didapatkan dari media cetak atau televisi. Akademisi (dosen) justru yang lebih banyak memilih media online (sosial media, media berita online) sebagai sumber informasi mengenai SNI.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Capaian penetapan kinerja tersebut, dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. **Melakukan Promosi untuk Pelaku Usaha, Regulator dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.** Kegiatan ini dilakukan dengan:
  - Mempromosikan SNI baru dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan LPK terkait substansi SNI.
  - Memberikan awareness kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah akan pentingnya SNI sebagai acuan dalam usaha dengan bekerjasama dengan Dinas terkait, komunitas, dan media partner.
  - Melakukan sinergi dengan kementerian dan lembaga yang bergerak dalam pembinaan kepada UMKM agar memudahkan UMKM dalam memenuhi regulasi dan pemenuhan SNI.
  - Membuat materi promosi dalam bentuk infografis terkait penerapan SNI, sertifikasi SNI dan skema akreditasi yang disebarluaskan kepada stakeholder

## **2. Melakukan Promosi untuk Penerap Standar Nasional Indonesia.**

Kegiatan ini dilakukan bertujuan mengajak perusahaan/organisasi penerap SNI untuk ikut dalam SNI Award, melalui gathering SNI Award dan rekrutasi peserta. Sosialisasi SNI Award dan Rekrutasi peserta kerjasama dengan lembaga sertifikasi. Promosi untuk penerap SNI juga dilakukan dengan mempromosikan UMKM penerap SNI sebagai role model bagi UMKM lainnya untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi UMKM lainnya

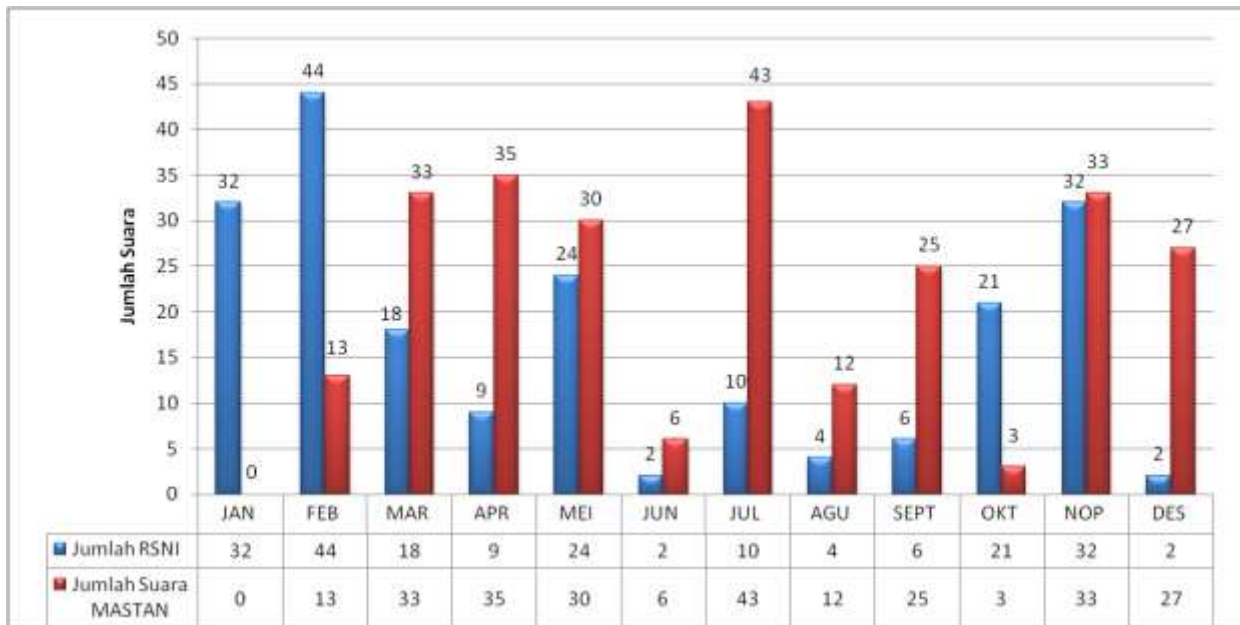
## **3. Melakukan Promosi untuk Publik**

Pada tahun 2016, promosi dan edukasi publik lebih banyak dilakukan melalui media digital baik melalui media online dan media sosial. Media sosial menjadi sarana komunikasi kepada publik untuk menyebarkan informasi SPK. Kecenderungan masyarakat kota yang beralih ke media online, menjadikan medsos BSN mempunyai pengikut/follower meningkat dari tahun sebelumnya. Promosi SPK kepada publik juga dilakukan melalui radio, televisi dan media online. Dengan promosi yang dilakukan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang “aware” dan paham mengenai SPK.

Untuk melakukan edukasi kepada konsumen dan memperbanyak artikel tentang manfaat produk ber SNI, BSN membuat blog belanjacerdas. Blog ini dalam pengembangan untuk dijadikan referensi bacaan ringan bagi konsumen dalam memilih produk berSNI. Untuk publikasi, BSN juga menerbitkan majalah SNI Valuasi yang disebarkan kepada stakeholder. Tahun 2016, SNI Valuasi dikembangkan dalam bentuk e-magazine agar dapat mudah diakses melalui media online.

## **4. Melakukan Pembinaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Kegiatan Standardisasi**

BSN melakukan fasilitasi pembinaan kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pengembangan SNI melalui penyelenggaraan *Forum Group Discussion (FGD)* untuk membahas topik RSNI3. Untuk mengajak para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam perumusan SNI, BSN juga menyebarkan informasi substansi RSNI3 melalui web site dan media sosial BSN setiap minggunya. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI seperti dalam Grafik 8.:



Gambar 8. Grafik jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI tahun 2016

Berdasarkan grafik tersebut, partisipasi masyarakat dalam perumusan SNI masih sangatlah rendah. Perlu ada upaya persuasif untuk meningkatkan masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap rancangan SNI. Tahun 2016 langkah persuasif dilakukan dengan FGD yang mengundang para pemangku kepentingan terkait content RSNI3 tersebut, namun hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Upaya ini akan berimplikasi kepada anggaran, langkah yang akan ditempuh adalah dengan mengirimkan email (blasting email) kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan bidang minat stakeholder. Namun data email pelanggan BSN dan para pemangku kepentingan dengan sektor terkait belum ada. Sehingga masih dalam bentuk manual, sehingga kadang informasi yang disebarluaskan belum tepat ke target sasaran.

## 5. Melakukan Pembinaan UKM Dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia

BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM bekerjasama dengan KL seperti KKP, BPOM, Pemda dan komunitas pembina UMKM seperti PUPUK, INOTEK, PNM, FLIPMAS. Pada tahun 2016, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada 45 UMKM yang terdiri dari 24 pangan dan 21 non pangan. Target pembinaan adalah sertifikasi SNI produk. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembinaan penerapan SNI produk ini seperti belum tersedianya SNI, belum tersedianya laboratorium yang diakreditasi KAN dengan ruang lingkup dimaksud, dan belum terpenuhinya standar sarana produksi pada UMKM pangan maupun faktor teknis

lainnya. Dengan kondisi tersebut, pada tahun 2016 ada 5 UMKM sudah mendapatkan sertifikat SNI dan 11 UMKM dalam proses sertifikasi (seperti pada tabel dibawah ini).

**Tabel 8 Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI dan dalam proses sertifikasi**

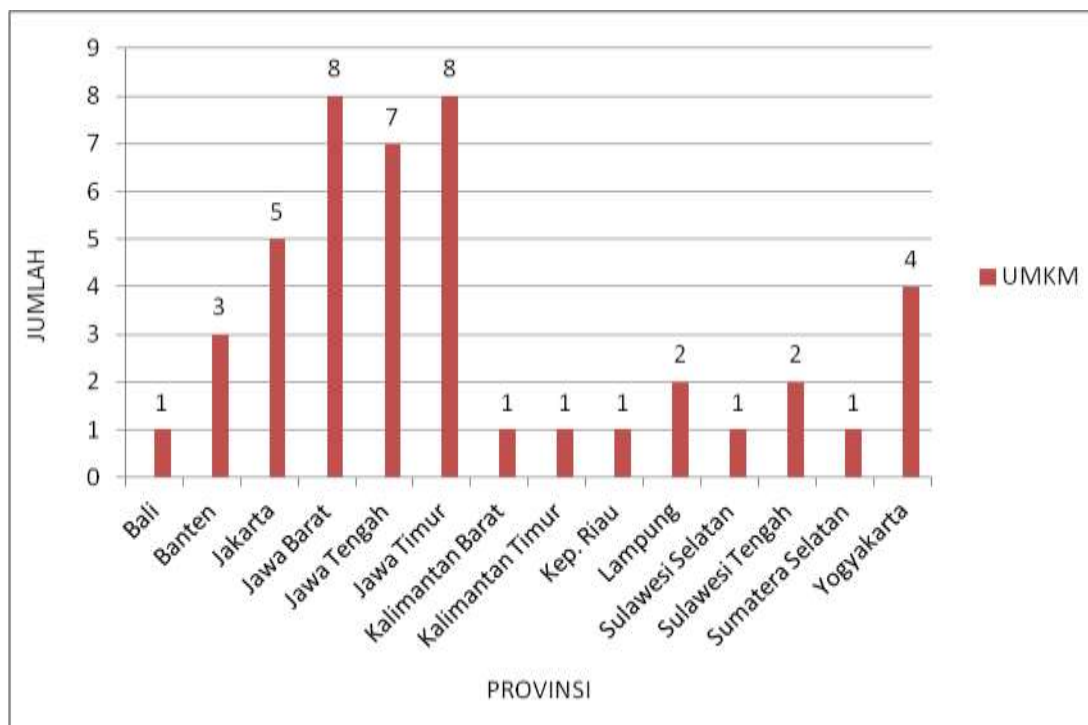
No	Nama UMKM	Sektor	Produk	Keterangan
1.	PT Hari Mukti Teknik	Non pangan	Mesin Laundry	Sudah mendapatkan sertifikat SMM SNI ISO 9001 dan SNI Produk
2.	UD Batik Satrio	Non pangan	Batik	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
3.	UD Batik Laweyan	Non pangan	Batik	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
4.	PT. Fajar Cipta Wacana	Non pangan	Konverter kit	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
5.	PT. Putra Multi Cipta Teknikindo	Non Pangan	Alat pembatik	Sudah mendapat Sertifikat SMM SNI ISO 9001 dan sertifikat SNI Produk
6.	PT. Trisakti Putra Bakti	Non pangan	Bola Bulu Tangkis	Proses sertifikasi SNI Produk
7.	CV Carita Niaga	Non Pangan		Proses sertifikasi SNI Produk
8.	Taman Grya	Pangan	Keripik belut	Proses sertifikasi SNI Produk
9.	Rumah Cobek	Pangan	Bandeng presto	Proses sertifikasi SNI Produk
10.	Minafood	Pangan	Naget	Proses sertifikasi SNI Produk
11.	UMKM BDS Snack	Pangan	Amplang	Proses sertifikasi SNI

				Produk
12.	UMKM Alang-alang subur	Pangan	Abon Ikan	Proses sertifikasi SNI Produk
13.	UMKM Indomina cipta	Pangan		Proses sertifikasi SNI Produk
14.	Raisa	Pangan	Dodol Pisang	Proses sertifikasi GMP
15.	Millenium	Pangan	Kerupuk ikan	Proses sertifikasi SNI Produk
16.	Mutiara Gading	Pangan	Abon Ikan	Proses sertifikasi SNI Produk

Dari 45 UMKM yang dibina ada 3 UMKM yang tidak dilanjutkan proses pembinaannya untuk tahun 2017 karena karena belum ada pasar untuk produk yang mereka hasilkan dan spesifikasi produk yang masih mengalami perubahan, UMKM tersebut adalah usulan dari Yayasan INOTEK yaitu CV. Arame Indonesia (Arame) dan PT. Atnic Ekotekno Wicaksana (Blumbang Reksa) sedangkan untuk Evindo, pembinaannya akan dilanjutkan oleh Kemenristek.

Sedangkan 26 UMKM lainnya masih akan dilanjutkan pembinaannya dengan 5 UMKM pembinaannya akan fokus pada pemenuhan standar sarana produksinya terlebih dahulu yaitu UMKM Pas Mantab, CV. Pradipta Jaya Food, Kelompok Usaha Pelita 15, dan Pempek dengan dibantu oleh KKP dan Dinas setempat dan UD. Dikari (Kerupuk Jawa) kerjasama dengan PNM. Ada 4 industri yang masih dalam tahap pengembangan SNInya yaitu CV. Gede Darma Putra / GDP Filter (IGW Home Ultrafilter), PT. Maxzer Solusi Steril (Sulis), PT. Bumibraja Nusantara (Bumibraja) dan Gesit. Sedangkan 1 (produk bawang goreng) masih dalam tahap usulan penambahan ruang lingkup untuk laboratorium yang diakreditasi KAN.

Berdasarkan Gambar 9, lokasi UMKM yang dibina tahun 2016 masih didominasi di Jawa. Tahun 2017 diharapkan akan tumbuh UMKM di luar Jawa yang sertifikasi SNI.



Gambar 9. Grafik Penyebaran lokasi UMKM yang dibina dalam penerapan SNI tahun 2016

## 6. Melakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi di Forum Internasional

Indonesia sejak tahun 2009 telah aktif berpartisipasi sebagai p member ISO COPOLCO, yang merupakan organisasi ISO yang membidangi masalah konsumen. Pada tanggal 13 - 17 Juni 2016 diselenggarakan ISO/COPOLCO Plenary Meeting di Jenewa, Swis. Pertemuan ini Indonesia diwakili oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Hadir pula dalam pertemuan tersebut wakil dari organisasi regional dan internasional yaitu: ANEC, Consumer Internasional (CI), OIML dan ISO Central Sekretariat.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Tri Widayani Pangastuti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malan. Salah satu usulan yang disampaikan delegasi Indonesia yaitu bahwa Indonesia bersedia untuk menjadi tuan rumah ISO/COPOLCO Plenary Meeting tahun 2018.

Untuk lebih meningkatkan kontribusi konsumen dalam pengembangan standar Internasional maka BSN membentuk national Mirror Committee (NMC) ISO/COPOLCO yang beranggotakan lembaga konsumen, dan lembaga pemerintah yang membidangi konsumen. Tugasnya antara lain member masukan terhadap draft standar ISO COPOLCO. Draft standar ISO dan dokumen COPOLCO yang telah ditanggapi oleh NMC tersebut, antara lain :

1. N 195 CIB - Survey to investigate service standardization needs from the consumer's point of view.
2. N 196 Consultation on Financial Literacy for Youth.
3. N 197 Proposal for an International Standard on service to vulnerable consumers.
4. SO/IEC CD Guide 14 - Product information for consumers.
5. ISO COPOLCO DIS ISO/IEC DGuide 46 (Ed 2) - Comparative testing of consumer products and related services - General principles

Untuk WG 18 - Consumer issues in services, BSN mengajukan Rifana Erni dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjadi expert di WG tersebut. Yang nantinya bertugas untuk memberikan tanggapan terhadap draft dokumen standar WG 18.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Bidang Pemasaryakatan Standardisasi diberikan alokasi pendanaan dalam kurun waktu 2015 s.d 2016, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 14 :

**Tabel 9: Perbandingan Kinerja anggaran Bidang Pemasaryakatan Standardisasi Tahun 2015 dan 2016 per Output Kegiatan**

No	URAIAN KEGIATAN	2015			2016		
		PAGU DALAM DIPA (RP)	REALISASI (RP)	%	PAGU DALAM DIPA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Pemasaryakatan Standardisasi	4.085.000.000	4.033.360.967	98,74	1.938.033.000	1.935.331.438	99,86
2	Partisipasi Masyarakat	1.272.940.000	1.244.257.798	97,75	2.000.000.000	1.993.391.786	99,67
	<b>TOTAL</b>	<b>5.357.940.000</b>	<b>5.277.618.765</b>	<b>98,50</b>	<b>3.938.033.000</b>	<b>3.928.723.224</b>	<b>99,76</b>



Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pagu anggaran PUSDIKMAS pada tahun 2016 mengalami penurunan karena efisiensi yang dilakukan karena kebijakan Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2016 pagu anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sebesar Rp. 3.928.723.224 dan di tahun 2015 sebesar Rp. 5.357.940.000.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS - Badan Standardisasi Nasional TA. 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja dapat dipenuhi oleh Bidang Pemasarakatan Standardisasi. Capaian kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi pada tahun 2016 meliputi : 1) Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK meningkat sebesar 25% (2) Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan meningkat sebesar 10% 3) Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI dengan nilai 4,03 skor dan 4) Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian 3,75 skor. Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.928.723.438,- atau 99,76 % dari total pagu Rp 3.938.033.000.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya yang lebih baik guna meningkatkan kinerja Bidang Pemasarakatan Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan dan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

Kiranya Laporan Kinerja Pemasarakatan Standardisasi, Pusdikmas, Kedeputian IPS, BSN Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya di Bidang Pemasarakatan Standardisasi di masa mendatang.